

**REKRUTMEN TERBUKA KEANGGOTAAN PARTAI
POLITIK ISLAM DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF SIYASAH ISLAM**

DISERTASI

**OLEH:
DEDEN KOSWARA
NIM : 180311020028**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025**

**REKRUTMEN TERBUKA KEANGGOTAAN PARTAI
POLITIK ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH ISLAM**

Disertasi

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Doktor Program Studi Ilmu Syariah

Oleh:
DEDEN KOSWARA
NIM : 180311020028

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PROGRAM DOKTORAL PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU SYARIAH
BANJARMASIN
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deden Koswara

NIM : 180311020028

Tempat/Tanggal Lahir: Muara Teweh, 23 September 1973

Jurusan/Program Studi: Ilmu Syariah

Fakultas/Program : Pascasarjana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul, **“REKRUTMEN TERBUKA KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH ISLAM”** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Disertasi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 24 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Deden Koswara

NIM. 180311020028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1412/Un.14/IV/UPM-BP/07/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com>, dengan ini, kami nyatakan bahwa disertasi yang ditulis oleh:

Nama : Deden Koswara
NIM : 180311020028
Jenjang/Program Studi : S-3 Ilmu Syaria'ah (IS)
Judul : Rekrutmen Terbuka Keanggotaan Partai Politik Islam di Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Islam.

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil 19% atau (kurang dari 20%). Naskah disertasi yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut disertakan dalam administrasi untuk ujian **TERBUKA**.

Banjarmasin, 16 Juli 2025

Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

Halaman Persetujuan
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA PROGRAM DOKTOR

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

DEDEN KOSWARA

NIM: 180311020028

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Untuk
Dapat Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH

Tanggal, 14 Juli 2025

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum.

Tanggal, 14 Juli 2025

PENGESAHAN DISERTASI

REKRUTMEN TERBUKA KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH ISLAM

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:

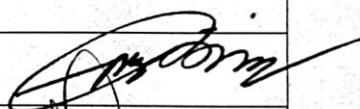
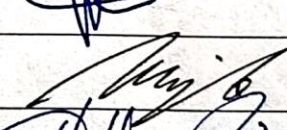
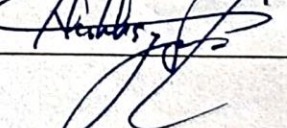
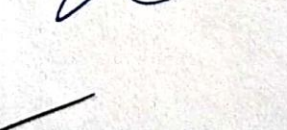
DEDEN KOSWARA

NIM : 180311020028

Telah diajukan kepada Dewan Penguji

Pada Hari Jumat, 25 Juli 2025

Dosen Penguji

No	Nama	Tanda Tangan
1	Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D	
2	Prof. H. Ahmadi Hasan, M.H.	
3	Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.	
4	Ahmad Muhajir, M.A., Ph.D	
5	Dr. H. Taufik Arbain, S.Sos., M.Si.	
6	Mujiburohman, M.A., Ph.D	
7	Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A.	

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana


Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D
NIP. 197105251997031006

ABSTRAK

Deden Koswara, NIM. 180311020028 **REKRUTMEN TERBUKA KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH ISLAM**. Disertasi. Pembimbing I: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH.; Pembimbing II: Prof. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum., Program Studi Doktor (S-3) Ilmu Syariah, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2025.

Kata kunci: *Rekrutmen terbuka, partai politik Islam, pragmatisme, penafsiran ulang ideologi, rekonstruksi konstitusional*

Dalam lanskap politik demokrasi elektoral seperti saat ini, realitas lapangan telah mendorong Partai-partai Islam mengambil pendekatan pragmatisme politik, yaitu pendekatan yang mengutamakan efektivitas dan pencapaian tujuan elektoral daripada kekakuan ideologis. Pragmatisme menuntut Partai Islam untuk lebih inklusif guna mencapai tujuan politik, meski harus menyesuaikan atau menafsirkan ulang doktrin ideologis Partai. Melalui penelitian mixed method diketahui bahwa inklusivitas Partai Islam dalam menerima keanggotaan nonmuslim memunculkan sejumlah problematika, baik problem filosofis, yuridis, maupun sosiologis, dan bagaimana rekonstruksi konstitusional ketentuan keanggotaan pada Partai-partai Islam tersebut.

Problem filosofis dalam sistem rekrutmen Partai-partai Islam mencerminkan konflik antara ideal normatif Islam dan kalkulasi politik demokratis, dikarenakan Partai Islam merupakan entitas politik yang mengusung nilai-nilai syariah, sementara negara menganut sistem hukum nasional yang bersifat pluralis dan sekuler dalam pengaturannya.

Partai Islam juga menghadapi problem sosiologis dikarenakan adanya beberapa jabatan struktur Partai yang hanya bisa dijabat oleh anggota yang beragama Islam. Hal ini memiliki potensi besar untuk terjadinya gesekan sosial dalam internal partai.

Sebagian Ahli menghendaki agar Partai Islam melakukan rekonstruksi asas dan sistem keanggotaan Partai. Asas Islam tidak lagi hanya dimaknai sebagai perjuangan simbolik tetapi sebagai komitmen terhadap nilai-nilai etis dan transformatif yang bersifat universal. Sebagian ahli yang lain menghendaki agar Partai Islam tetap mempertahankan ideologi Islamnya, dan menerapkan ideologi tersebut secara konsekuen. Karena yang bermasalah bukan pada asas, tetapi penerapan dan kualitas SDM pelaksana Partai.

Setidaknya ada 2 (dua) alternatif penyesuaian pada konstitusi Partai-partai Islam. *Pertama*, rekonstruksi sistem rekrutmen keanggotaan, dapat berupa: 1) Penegasan bahwa sistem keanggotaan Partai Islam hanya dari kalangan umat Islam, yang berarti menjadikan Partai-partai Islam tersebut sebagai partai tertutup (eksklusif); 2) Mencantumkan secara tegas dan jelas dalam AD/ART Partai bahwa sistem keanggotaan Partai Islam adalah bersifat terbuka untuk seluruh warga negara

Indonesia; 3) Mempertahankan rumusan ketentuan rekrutmen sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam AD/ART Partai Islam. Secara implisit, sistem rekrutmen Partai-partai Islam tersebut sudah bersifat terbuka, sama sebagaimana ketentuan sistem rekrutmen yang berlaku pada partai nasionalis sekuler seperti PDIP dan Partai Golkar. *Kedua*, rekonstruksi asas Islam Partai, dapat berupa: 1) Penghapusan asas Islam. Hal ini dikarenakan sikap pragmatisme Partai-partai Islam yang dianggap tidak berbeda dengan partai nasionalis sekuler. 2) Rekonstruksi asas Islam yang kontekstual. Selama ini formulasi asas Islam dianggap kaku dan eksklusif, sehingga Partai-partai Islam perlu merekonstruksi konstitusinya agar asas Islam tidak hanya dimaknai sebagai perjuangan simbolik, tetapi sebagai komitmen terhadap nilai-nilai etis dan transformatif yang bersifat universal. Ini merupakan jalan tengah Partai Islam dalam sistem politik demokrasi tanpa kehilangan jati diri ke-Islamannya. *Ketiga*, peneguhan asas Islam Partai, karena yang dipandang sebagai problematikanya adalah pada kualitas sumber daya dan personalia partai, sehingga yang perlu dibenahi adalah sumber daya dan personalia partai, bukan pada asas partai.

ABSTRACT

Deden Koswara, ID Number 180311020028 *Open Recruitment Of Islamic Political Party Membership In Indonesia From The Perspective Of Islamic Jurisprudence*. Dissertation. Supervisor I: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH.; Supervisor II: Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., Doctoral Program (S-3) in Sharia Studies, Postgraduate Program, UIN Antasari Banjarmasin. 2025.

Keywords: *Open recruitment, Islamic political parties, pragmatism, ideological reinterpretation, constitutional reconstruction*

In the current political landscape of electoral democracy, the realities on the ground have encouraged Islamic parties to adopt a pragmatic political approach, namely an approach that prioritizes effectiveness and the achievement of electoral goals over ideological rigidity. Pragmatism demands that Islamic parties be more inclusive in order to achieve their political goals, even if this requires adjusting or reinterpreting the party's ideological doctrine. Through mixed methods research, it was discovered that the inclusiveness of Islamic Parties in accepting non-Muslim members raises a number of problems, including philosophical, legal, and sociological ones, and how the constitutionality of membership provisions within these Islamic parties should be reconstructed.

The philosophical problems within the recruitment systems of Islamic parties reflect the conflict between normative Islamic ideals and democratic political calculations, as Islamic Parties are political entities that uphold Sharia values, while the state adheres to a pluralist and secular national legal system.

Islamic Parties also face sociological problems due to the existence of several structural positions in the Party that can only be held by Muslim members. This has significant potential for social friction within the parties.

Some experts urge Islamic Parties to reconstruct their principles and membership system. Islamic principles should no longer be interpreted merely as a symbolic struggle but as a commitment to universal ethical and transformative values. Others urge Islamic Parties to maintain their Islamic ideology and implement it consistently. The problem lies not in the principles, but in the implementation and quality of the Party's human resources.

There are at least two alternative adjustments to the constitutions of Islamic parties. *First*, the reconstruction of the membership recruitment system could take the following forms: 1) Affirming that Islamic Party membership is restricted to Muslims only, thus making these parties closed (exclusive) parties; 2) Clearly

stating in the party's bylaws (AD/ART) that the Islamic Party membership system is open to all Indonesian citizens; 3) Maintaining the formulation of recruitment provisions as stipulated in the Islamic Party's bylaws (AD/ART). Implicitly, the recruitment system of these Islamic parties is already open, similar to the recruitment provisions applicable to secular nationalist parties such as the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) and the Golkar Party. *Second*, the reconstruction of the party's Islamic principles could take the following forms: 1) Eliminating the Islamic principle. This is due to the pragmatism of Islamic parties, which is considered no different from that of secular nationalist parties; 2) A contextual reconstruction of Islamic principles. Until now, the formulation of Islamic principles has been considered rigid and exclusive, so Islamic parties need to reconstruct their constitutions so that Islamic principles are not merely interpreted as a symbolic struggle, but as a commitment to universal ethical and transformative values. This is a compromise for Islamic parties in a democratic political system without losing their Islamic identity. *Third*, strengthening the party's Islamic principles, because the problem is seen as the quality of party resources and personnel. Therefore, what needs to be improved is party resources and personnel, not party principles.

مستخلص البحث

ديبن كُسَوارا، رقم قيد الطالب. 180311020028. **التوظيف المفتوح لعضوية الأحزاب السياسية الإسلامية في إندونيسيا من منظور السياسة الإسلامية**. رسالة الدكتوراة. المشرف الأول: البروفسور الدكتور الحاج. أحمددي حسن. المشرف الثاني: البروفسور الدكتور الحاج. جلال الدين. قسم الشريعة. الدراسات العليا جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية بنجرماسين، 2025.

الكلمات المفتاحية: فتح باب الترشح، الأحزاب السياسية الإسلامية، البراغماتية، إعادة التفسير الأيديولوجي، إعادة بناء الدستور

في ظل المشهد السياسي الراهن للديمقراطية الانتخابية، شجعت الوقائع على الأرض الأحزاب الإسلامية على تبني نهج سياسي براغماتي، أي نهج يُعطي الأولوية للفعالية وتحقيق الأهداف الانتخابية على التشدد الأيديولوجي. تقتضي البراغماتية أن تكون الأحزاب الإسلامية أكثر شمولية لتحقيق أهدافها السياسية، حتى لو تطلب ذلك تعديل أو إعادة تفسير عقيدتها الأيديولوجية. ومن خلال بحثٍ متعدد الأساليب، تبين أن شمولية الأحزاب الإسلامية في قبول أعضاء غير مسلمين تثير عددًا من الإشكاليات، منها فلسفية وقانونية واجتماعية، وكيفية إعادة هيكلة أحكام العضوية داخل هذه الأحزاب الإسلامية. تعكس الإشكاليات الفلسفية في أنظمة التجنيد في الأحزاب الإسلامية التعارض بين المثل الإسلامية المعيارية والحسابات السياسية الديمقراطية، فالأحزاب الإسلامية كيانات سياسية تُعلي من قيم الشريعة الإسلامية، بينما تلتزم الدولة بنظام قانوني وطني تعددي وعلماني. كما تواجه الأحزاب الإسلامية إشكاليات اجتماعية نظرًا لوجود العديد من المناصب الهيكلية في الحزب التي لا يمكن أن يشغلها إلا الأعضاء المسلمون. وهذا يُنذر بخطر كبير لحدوث خلافات اجتماعية داخل الأحزاب.

يبحث بعض الخبراء الأحزاب الإسلامية على إعادة هيكلة مبادئها ونظام عضويتها. لا ينبغي تفسير المبادئ الإسلامية على أنها مجرد نضال رمزي، بل كالتزام بالقيم الأخلاقية والتحويلية العالمية. ويبحث آخرون الأحزاب الإسلامية على الحفاظ على أيديولوجيتها الإسلامية وتطبيقها باستمرار. تكمن المشكلة ليس في المبادئ، بل في تطبيق وجودة الموارد البشرية للحزب.

هناك على الأقل تعديلان بديلان لدساتير الأحزاب الإسلامية. أولاً، يمكن أن تتخذ إعادة بناء نظام تجنيد العضوية الأشكال التالية: (1) التأكيد على أن عضوية الحزب الإسلامي مقتصرة على المسلمين فقط، مما يجعل هذه الأحزاب أحزابًا مغلقة (حصرية)؛ (2) النص بوضوح في النظام الأساسي للحزب (AD/ART) على أن نظام عضوية الحزب الإسلامي مفتوح لجميع المواطنين الإندونيسيين؛ (3) الحفاظ على صياغة أحكام التجنيد كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للحزب الإسلامي (AD/ART). وضمنيًا، فإن نظام التجنيد لهذه الأحزاب الإسلامية مفتوح بالفعل، على غرار أحكام التجنيد المطبقة على الأحزاب القومية العلمانية مثل الحزب الديمقراطي الإندونيسي للنضال (PDIP) وحزب جولكار. ثانيًا، يمكن أن تتخذ إعادة بناء المبادئ الإسلامية للحزب الأشكال التالية: (1) إلغاء المبدأ الإسلامي. ويعود ذلك إلى براغماتية الأحزاب الإسلامية، التي لا تختلف عن براغماتية الأحزاب القومية العلمانية؛ (2) إعادة بناء سياقية للمبادئ الإسلامية. حتى الآن، اعتُبرت صياغة المبادئ الإسلامية جامدة وحصرية، لذا تحتاج الأحزاب الإسلامية إلى إعادة بناء دساتيرها بحيث لا تُفسر المبادئ الإسلامية على أنها مجرد صراع رمزي، بل كالتزام بالقيم الأخلاقية والتحويلية العالمية. وهذا حل وسط للأحزاب الإسلامية في نظام سياسي ديمقراطي دون فقدان هويتها

الإسلامية. ثالثاً، تعزيز المبادئ الإسلامية للحزب، لأن المشكلة تُرى في جودة موارد الحزب وكوادره. لذلك، ما يحتاج إلى تحسين هو موارد الحزب وكوادره، وليس مبادئه.

KATA PENGANTAR

Bismillâhi al-rahmâni al-rahîm,

Alhamdulillahillâhi rabbil ‘âlamîn, segala puji hanya untuk Allahﷻ, Tuhan Semesta Alam, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya Disertasi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa diucapkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammadﷺ, keluarga Beliau, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah dalam mengemban Islam hingga akhir zaman, karena berkat beliau dan merekalah Islam telah sampai kepada kita, hingga kita menikmati manisnya iman dan Islam.

Dalam kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang langsung maupun tidak langsung telah turut membantu (sekaligus memberikan dorongan moral) dalam penyelesaian Disertasi ini, diantaranya :

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA.;
2. Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D.;
3. Ketua Prodi S3 Ilmu Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Mujiburohman, M.A., Ph.D., dan Sekretaris Prodi S3 Ilmu Syariah, Dr. Nuril Khasyi'in;
4. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH selaku Pembimbing 1 dan Prof. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum selaku Pembimbing 2 yang telah membimbing penulisan dan penyelesaian Disertasi ini;
5. Rektor Universitas Lambung Mangkurat dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberi izin kepada Penulis untuk

melanjutkan studi doktoral di Program Doktor Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin;

6. Yayasan H. Maming Enam Sembilan yang telah memberikan beasiswa pendidikan kepada Penulis;
7. Bapak H. Suwardi Sarlan, selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PPP DPW PPP Kalsel, dan bapak Laifvan Shuffy Irwany, selaku Ketua Bidang Kepemudaan DPW PKS Kalsel, yang telah bersedia diwawancara dan memberikan informasi dalam penelitian ini;
8. Kedua orang tua tercinta (bapak Omon Achmad (alm.) dan ibu Yulia Noor Ainah (alm.)), semoga Allahﷻ angkat derajat mereka dan menempatkan mereka bersama orang-orang beriman;
9. Isteri tercinta Hersanti Tri Rachmawati, S.E yang senantiasa membantu dan mensupport dalam menyelesaikan Disertasi ini. Dan yang lebih penting lagi menjaga Penulis untuk senantiasa “terjaga” dalam Islam;
10. Anak-anakku tercinta Nabiila Az-Zahra, Muhammad Al-Fatih, Muhammad Ar-Rasyid, Aisyah Az-Zahra, dan Muhammad Ash-Shiddiq;
11. Dr. H. Mispansyah, SH., MH, Dr. Muhammad Ananta Firdaus, SH., MH., Fahmi, S.Pd., M.Pd., dan ust. H. Hidayatul Akbar, S.E, yang telah membantu mensupport dan meminjamkan buku sebagai referensi kepada Penulis;
12. Tim LBH Pelita Umat Korwil Kalimantan Selatan yang selalu mensupport dan mendoakan Penulis;
13. Saudara Muhammad Zacky Ansari dan Dwi Damayanti yang telah membantu Penulis dalam mendapatkan data di lapangan;

14. Kawan-kawan para pejuang dan pembela Islam Yang Terpercaya, terima kasih atas doa dan supportnya;
15. Para Dosen HTN FH ULM, terima kasih atas doa dan supportnya;
16. Perpustakaan ULM, Perpustakaan UIN Antasari, dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin yang telah menyediakan bahan-bahan dalam penyelesaian Disertasi ini;
17. Teman-teman kuliah S3 Ilmu Syariah, khususnya angkatan 2018 yang saling mensupport untuk menyelesaikan Disertasi ini;
18. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian Disertasi ini (mohon maaf jika tidak disebutkan namanya).

Penulis hanya bisa mengucapkan “*Jazakumullahu khairan katsiran*”, semoga Allahﷻ melimpahkan rahmat serta pahala-Nya kepada mereka semua.

Walaupun Disertasi ini jauh dari sempurna, namun Penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi mereka yang terjun dan menggeluti dunia politik melalui sebuah partai politik (terutama partai politik yang berasaskan Islam).

Hanya kepada Allahﷻ lah Penulis berserah diri dan mengembalikan segala urusan.

Banjarmasin, 14 Juli 2025

Penulis,

Deden Koswara



TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penulisan Disertasi ini, didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 27 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf sebagai berikut:

Arab	Latin		Arab	Latin
ا	A		ط	Th
ب	B		ظ	Zh
ت	T		ع	‘
ث	Ts		غ	Gh
ج	J		ف	F
ح	H		ق	Q
خ	Kh		ك	K
د	D		ل	L
ذ	Dz		م	M
ر	R		ن	N
ز	Z		و	W
س	S		ء	‘
ش	Sy		ه	H
ص	Sh		ي	Y
ض	Dh			

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (difting). Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

3. Vokal Rangkap

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـِ	ai	a dan i
ـَـُ	au	a dan u

4. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـَـَ	â	a dengan topi di atas
ـِـِـِ	î	i dengan topi di atas
ـُـُـُ	û	u dengan topi di atas

5. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*

6. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـ) (dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضكره) (tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

7. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-wujûd

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan

kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pernyataan Keaslian Tulisan	
Halaman Bukti Bebas Plagiasi	
Halaman Persetujuan	
Halaman Pengesahan	
Halaman Abstrak	
Halaman Kata Pengantar	
Halaman Transliterasi	
Halaman Daftar Isi	
Halaman Daftar Tabel	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan Penelitian	23
D. Signifikansi Penelitian	23
E. Definisi Istilah	23
F. Penelitian Terdahulu	24
G. Kajian dan Kerangka Teori	30
1. <i>Grand Theory</i> : Teori Negara Hukum.....	30
2. <i>Middle Theory</i> : Teori Pragmatisme	33
3. <i>Applied Theory</i> : Teori Asas Hukum	37
H. Metode dan Teknik Analisa Data.....	39
1. Jenis Penelitian.....	39
2. Pendekatan Penelitian	41
3. Jenis Sumber Bahan Hukum	43
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	44
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	44
I. Sistematika Penulisan	45
BAB II KONSEPSI KEANGGOTAAN PARTAI DALAM KONSTITUSI PARTAI-PARTAI ISLAM DI INDONESIA	
A. Partai Politik.....	46
1. Pengertian Partai Politik.....	46
2. Fungsi Partai Politik.....	56
B. Siyasah Islam dan Kepartaian Islam	62
C. Partai Islam Di Indonesia	70

1. Pengertian Partai Islam	70
2. Partai Islam Di Indonesia	82
D. Rekrutmen Keanggotaan Partai	92
1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).....	106
2. Partai Bulan Bintang (PBB)	112
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	119
BAB III PROBLEM NORMATIF DAN PRAGMATIS KEANGGOTAAN PARTAI-PARTAI ISLAM DI INDONESIA	
A. Problem Filosofis	125
B. Problem Yuridis	149
C. Problem Sosiologis	173
BAB IV REKONSTRUKSI KONSTITUSIONAL KETENTUAN KEANGGOTAAN PADA PARTAI-PARTAI ISLAM DI INDONESIA	
A. Analisis Pendapat Para Sarjana	189
B. Analisis Pragmatisme Politis	213
C. Beberapa Alternatif Penyesuaian pada Konstitusi Partai-partai Islam	242
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	263
B. Saran.....	265
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No	Tabel	Halaman
1	Daftar Partai Berasaskan Islam Tahun 1999	90
2	Daftar Partai Berasaskan Islam Tahun 2004	91
3	Daftar Partai Berasaskan Islam Tahun 2009	92
4	Daftar Partai Berasaskan Islam Tahun 2014	92
5	Tabel Perolehan Suara PPP, PBB, dan PKS Pemilu 1999 - 2024	124